

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Studi ini mengelaborasi tentang efektivitas Kelompok Tani Dayak Misik dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Adat Pematang Limau Tahun 2019. Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya, dan juga kepentingan masyarakat yang mendiami daerah tersebut berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal usul, dan atau hak tradisional yang telah diakui dan juga dihormati dalam *system* pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang telah dijelaskan di Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Di Indonesia memiliki banyak keberagaman. Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 250 juta jiwa dan juga terdiri dari 13.466 pulau. Pulau Kalimantan merupakan Pulau tersebar ketiga di dunia. Salah satu suku yang paling terkenal di Kalimantan ialah di suku Dayak, mereka mayoritas tinggal di Kalimantan Tengah.

Orang – orang Dayak merupakan penduduk pulau Kalimantan yang asli karna tidak ada orang Dayak yang tinggal di luar Kalimantan, karena dari dulu mereka sudah mendiami baik di bagian darat maupun di pantai – pantai pulau Kalimantan. Namun, dengan berjalannya waktu orang – orang dari

Sumatera, Melayu, dan juga Tanah Semananjung Melaka datang sehingga orang Dayak lama kelamaan bertambah jauh ke daerah Pedalaman hutan Kalimantan di satu sisi. Dan juga di sisi lain masyarakat Dayak memiliki tradisi berladang berpindah. Dari tahun ketahun mereka mencari hutan yang dirasa subur untuk digunakan bercocok dan berladang sebagai mata pencaharian demikian seterusnya. Dalam buku yang judul Pembebasan Petani Dayak Misik, Mikhail Coomansm menjelaskan juga bahwa dengan bergantinya tahun ketahun, puluhan tahun dan bahkan puluh ribuan tahun akhirnya hampir seluruh daerah dipelosok pedalaman Kalimantan tidak ada yang lepas dari hunian orang Dayak. Dan sekarang mereka masing – masing menumbuh-kembangkan kebudayaan mereka secara mandiri.

Nenek Moyang suku Dayak, telah lama mendiami dan bertempat tinggal di atas tanah Borneo-Kalimantan ini, jauh sebelum lahirnya NKRI ini. Itu sebabnya suku Dayak disebut sebagai penduduk asli pulau Kalimantan. Demikian pula halnya nenek moyang suku Dayak yang mendiami “Tanah Dayak” Kalimantan Tengah, misalnya Tambun Bungai, Rambang Ringkai, dsb. Selanjutnya tercatat dalam sejarah lokal, bahwa Damang Batu dengan dukungan Kolonial Belanda, menyelenggarakan Rapat Damai Tumbang Anoi (yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Gunung Mas) yang konon dihadiri oleh perwakilan suku – suku Dayak dari berbagai penjuru pulau Kalimantan/Borneo pada tahun 1894.

Selanjutnya memasuki era NKRI, keturunan suku Dayak bergabung dengan Republik Indonesia dengan penuh suka cita dan harapan supaya dapat

memiliki kehidupan yang lebih baik lagi sebagaimana yang diharapkan juga oleh pendiri bangsa ini. Pada 17 Agustus 1945 perjuangan seluruh anak bangsa yang mengusir penjajah berhasil dengan mendirikan sebuah negara yang merdeka bernama NKRI. Lalu pemerintah serta seluruh masyarakat Indonesia berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai segala bentuk pembangunan fisik maupun non fisik dan bahkan sampai sekarang demi menggapai cita – cita masyarakat bersama yaitu menginginkan rakyat Indonesia yang Adil dan Makmur.

Untuk masyarakat adat, tanah dan juga sumber daya yang ada di daerahnya merupakan suatu identitas akan keberadaannya. Maka pengakuan akan administrasi tentang tanah adat tersebut juga penting. Di Kalimantan Tengah sebelumnya, tanah adat sendiri tidak dianggap terlalu penting untuk di kelola oleh masyarakat, sehingga masyarakat yang memiliki tanah tersebut tidak semuanya memiliki bukti tertulis akan kepunyaannya. Sehingga hal ini mengakibatkan timbulnya sengketa dari pihak kelola dan pihak lainnya. Sampai pada akhirnya pemerintah provinsi Kalimantan Tengah merasa perlunya untuk melindungi tanah-tanah adat dengan cara mengeluarkan bukti tertulis dengan merumuskan pengaturan mengenai lembaga adat yang berwenang untuk mengeluarkan bukti tertulis tersebut. Lembaga adat ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Salah satu kewenangan dari Damang Kepala Adat yang merupakan pemimpin dari lembaga adat ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Huruf D Perda

Kelembagaan Adat Dayak adalah membuat Surat Keterangan Tanah Adat (SKT-A).

Dilihat dari penjelasan di atas, bahwa dengan adanya pasal tersebut sehingga menjadikan bukti untuk kepemilikan masyarakat terhadap tanah adat dan juga dapat digunakan sebagai alat bukti akan dalam pendaftaran hak atas tanah sebagai mana yang sudah di tentukan di Undang – Undang Pokok Agraria.

Beberapa landasan demi memperkuat akan desa adat penting untuk setiap orang yang memiliki mempunyai bukti tertulis antar lain; konstitusional, norma dasar dan juga legal formal yang menjadi “Roh-Optimisme” perjuangan dan progam Kelompok Tani Dayak Misik, yaitu : (1) Pancasila, (2) NKRI, (3) Bhineka Tunggal Ika, (4) Pembukaan UUD 1945, (5) Pasal 18B UUD 1945, (6) Psl 28 UUD 1945, (7) Psl 33 UUD 1945, (8) UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, (9) Psl 67 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (10) Keputusan MK No. 35 Tahun 2012, bahwa tentang tanah adat diluar hutan negara, (11) Perda No. 16 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah dan (12) Pergub No. 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat di Kalimantan Tengah.

Masyarakat Adat Dayak di pedalaman dan di pedesaan terkait pengambilan alihan tanah, lahan dan hutan biasa di berikan asumsi negatif yaitu memberikan : ganti rugi, jual beli, tali asih. Konvensasi dan dirampah begitu saja. Dapat disimpulkan bahwa hutan, tanah dan lahan tersebut beralih penguasaan suku Dayak, bersamaan dengan hilangnya simbol – simbol

kearifan lokal dan hak – hak tradisional diatas tanah tersebut, contohnya ; hak untuk meramu, hak untuk berburu, hak untuk memungut hasil hutan, hak berladang dan bercocok tanam dan lain sebagainya.

Pada awalnya Masyarakat Adat Dayak Kalimantan Tengah, percaya sepenuhnya dan juga menunggu serta menerima rancangan dan progam pembangunan dari pusat. Akan tetapi, pada kenyataanya yang telah dijalani, dipahami, disaksikan dan juga di rasakan oleh mereka disana dalam kehidupan masyarakat Dayak terutama para petani yang berladang yang hidup di pedesaan dan dipedalaman, ternyata ada bagian prinsip yang terabaikan, yaitu terkait **hak atas tanah, hutan dan lahan**. Sekitar 258 desa dari 1568 desa/Kelurahan se Kalimantan Tengah yang tinggal desanya saja. Sementara 80 hingga 90% wilayah desa tersebut dikuasi guna kepentingan investasi, transmigrasi dan juga demi kepentingan pembangunan lainnya. Sayangnya hal ini terus berlangsung dan juga begitu dinamis. Sehingga, diwilayah tersebut sudah hampir tidak ada lagi untuk berburu, tempat bercocok tanam, tempat meramu, tempat memungut hasil, tempat berladang dan bahkan tempat – tempat benda *religious* magis warisan leluhur. Disisi lain, sumber daya alam (SDA) yang berlimpah di Kalimantan Tengah juga sudah banyak di eksploitasi secara besar – besaran sejak tahun 70-an hingga sekarang, namun tidak berbanding lurus dengan kenyataannya yang dirasakan oleh penduduk asli Kalimantan Tengah. Masyarakat Adat Dayak belum mendapatkan porsi bagian yang adil, wajar dan seharusnya yang mereka terima.

Dari kenyataan diatas dan juga setelah menghadiri Deklarasi 1 September 2014 di Istana Wakil Presiden RI, perihal Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah yang sadar “Misik” melalui Dewan Adat Dayak (DAD), dengan mengajukan sebuah progam yang bersifat bottom up dari masyarakat kepada Pemerintah, yaitu progam yang bernama : **“Kelompok Tani Dayak Misik”**, progam tersebut fokus kepada hal mendasar seperti, antara lain ;

1. Memohon kepada pemerintah dan juga pemerintah daerah untuk memberikan pengakuan, perlindungan dan legalitas tanah, lahan atau hutan 5 ha/KK di desa masing – masing, dalam bentuk pemberian sertifikat secara gratis maupun dalam bentuk legalitas lainnya seperti HGU, HT, HTR, atau nama lainnya.

Keluarga miskin terkonsentrasi di sektor pertanian. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja dari mayoritas kepala rumah tangga miskin. Kendati jumlah rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian hanya mewakili 41 persen dari total populasi, namun hampir dua pertiga kepala rumah tangga miskin bekerja di sektor ini. Sepanjang sejarah, para pekerja di sektor pertanian, baik formal maupun informal, memiliki rata-rata pengeluaran per kapita terendah dan angka kemiskinan yang lebih tinggi. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 25,7 persen, rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian memiliki kemungkinan 2,6 kali lebih besar untuk menjadi miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang bekerja di sektor nonpertanian. Kontribusi pendapatan dari sektor pertanian bagi total pendapatan keluarga

miskin adalah sebesar 40 persen, dibandingkan dengan 32 persen bagi keluarga hampir-miskin, dan 15,8 persen bagi keluarga tidak miskin.

Mengatasi kemiskinan adalah salah satu dengan program atau kebijakan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang dilakukan secara terencana, sistematis dan juga bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dan guna mengurangi jumlah penduduk yang miskin dan dapat meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dari penjelasan dasar tentang program Dayak Misik tersebut yang didasarkan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah, maka seharusnya angka kemiskinan yang ada di Kalimantan Tengah sendiri tidak terlalu banyak. Dengan adanya program Dayak Misik yang sudah dijelaskan Panjang lebar diatas, maka angka kemiskinan bisa dapat berkurang

Di salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah yaitu Seruyan, dilansir dari BPS atau Badan Penelitian Statistik Kabupaten Seruyan yang dimuat dalam Buku Kecamatan Seruyan Hilir dalam Angka Tahun 2017 dan pada tahun 2018 Kecamatan Seruyan Hilir memiliki 8 Desa, Desa Baung, Desa Jahitan, Desa Muara Dua, Desa Pematang Limau, Desa Persil Raya, Desa Sungai Perlu, Desa Sungai Undang, dan juga Desa Tanjung Rangas,. Dibawah ini merupakan data jumlah penduduk serta angka kemiskinan yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir, seperti berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data RASTRA Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2017 dan 2018**

No	Nama Desa/Kelurahan	2017		2018	
		Jumlah KK	Kemiskinan	Jumlah KK	Kemiskinan
1.	Baung	588 KK	15 KK	643 KK	12 KK
2.	Jahitan	97 KK	14 KK	101 KK	9 KK
3.	Muara Dua	145 KK	22 KK	151 KK	15 KK
4.	Pematang Limau	784 KK	105 KK	817 KK	87 KK
5.	Persil Raya	596 KK	125 KK	621 KK	113 KK
6.	Sungai Perlu	28 KK	14 KK	29 KK	9 KK
7.	Sungai Undang	828 KK	169 KK	863 KK	152 KK
8.	Tanjung Rangas	1246 KK	39 KK	1299 KK	30 KK

**Sumber : Pemerintahan Kecamatan Seruyan Hilir Tahun 2017 dan 2018**

Kecamatan Seruyan Hilir yang rata – rata mata pencaharian penduduknya adalah dibidang pertanian, perikanan, dan juga perkebunan . Dari data di atas Desa Pematang Limau pada tahun 2017 merupakan Desa ke dua yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Kecamatan di Seruyan Hilir sebanyak 784 KK dengan jumlah kemiskinan sebanyak 89 KK, dan pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk 817 KK dengan jumlah kemiskinan 78 KK. Dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir, Desa Pematang Limau merupakan Desa yang pertama mendapatkan progam Pembebasan Petani Dayak ini. Dengan jumlah Kemiskinan yang yang menurun namun juga jumlah penduduk yang bertambah membuat penelitian tertarik dengan meneliti Progam Pembebasan Petani Dayak di Desa Adat Pematang Limau ini, karena progam yang ditujukan guna mensejahterakan masyarakat Kalimantan Tengah ini, khususnya masyarakat yang ada di pedalaman dan



juga di pedesaan. Dengan jumlah kemiskinan yang sudah dijelaskan di atas antara tahun 2017 dan 2018 tersebut di Kalimantan Tengah terkhusus di Kecamatan Seruyan Hilir Desa Pematang Limau ini seperti yang telah tertera di tabel tersebut, apalagi wilayah Pematang Limau kebanyakan mata pencahariannya di bidang perkebunan dan pertanian dan juga wilayahnya yang strategis dengan lahan lahan yang masih banyak kosong. Apakah program Pembebasan petani Dayak dari Pengentasan Kemiskinan di Pematang Limau ini berjalan seperti semestinya artinya program yang sudah di susun oleh pemerintah daerah tersebut apakah sudah tepat sasaran guna mensejahterakan masyarakat di pedalaman atau di pedesaan tersebut.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Efektivitas Kelompok Tani Dayak Misik dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa adat Pematang Limau Tahun 2019?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas Kelompok petani dayak misik dalam pengentasan kemiskinan di Desa Adat Pematang Limau Tahun 2019.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan wawasan yang lebih dalam pengetahuan dan menulis serta dengan teori – teori yang ada.

2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk mahasiswa maupun masyarakat lainnya.

**b. Manfaat Praktis**

1. Mengetahui apakah program Kelompok Tani Dayak Misik dari kemiskinan ini efisien dalam proses kebijakannya.
2. Sebagai acuan untuk pemerintah dalam melakukan kebijakan tersebut.

**1.5. Studi Terdahulu**

Ada 10 literatur yang digunakan untuk membandingkan penelitian yang satu dengan yang lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Jurnal yang ditulis oleh (Daulay, 2013) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dari suku Anak Dalam yang tinggal di kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Thaha Senami. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif, hasil dari penelitian ini ialah warga telah banyak meninggalkan kegiatan eksploitasi hutan tersebut dan beralih menjadi petani kebun karet dan juga sawit. Karena mereka menyadari status Tahura sebagai hutan lindung dan mereka mengikuti aturan yang sudah berlaku, walaupun sebenarnya mereka tak sepenuhnya setuju karena bagi mereka pendapatan jadi tidak maksimal dan merasa terbatas karena adanya hutan yang dilindungi. Ancaman terbesar terhadap Tahura saat ini berasal dari warga pendatang yang terlibat pembalakan liar dan mendirikan pemukiman di kawasan Tahura. Ke depannya warga SAD menginginkan diberi pelatihan life skill serta izin mengolah lahan hutan yang gundul untuk ditanami karet dan sawit.

Dalam penelitian yang disampaikan oleh (Alfana, 2014) menjelaskan strategi masyarakat pedesaan di tiga desa dengan kondisi geografis yang berbeda untuk keluar dari kemiskinan. Terpilihnya tiga desa itu karena jumlah penduduk miskinnya secara absolut dan relatif tinggi. Perbedaan itu menarik untuk diteliti karena ada variasi strategi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara pada 323 rumah tangga yang tergolong miskin. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada variasi strategi rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Rumah tangga miskin di tiga desa menerapkan beberapa strategi. Namun diversifikasi sumber-sumber pendapatan merupakan strategi yang paling banyak dipilih oleh penduduk miskin. Usaha diversifikasi yang dilakukan adalah mengusahakan ternak sapi dan menambah jumlah pohon kakao. Perbedaan pemilihan strategi tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi geografis di setiap desa.

Dalam penelitian ini yang ditulis (Gunamantha, 2015) Pendekatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPD merupakan pengembangan lebih lanjut dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1998. Salah satu agenda penting di tingkat masyarakat terkait pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan adalah kegiatan pengembangan kapasitas individu masyarakat, pada tataran pelaksanaan di masyarakat kegiatan pengembangan kapasitas tersebut meliputi proses sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan siklus pemberdayaan. Alat analisis yang digunakan dalam mengevaluasi proses pemberdayaan

adalah menggunakan model pendekatan evaluasi Fujikake. Model Fujikake merupakan salah satu model evaluasi yang menurut penulis cukup implementatif, dimana indikator-indikator yang digunakan cukup lengkap dan bisa diukur dengan jelas. Penjabaran mengenai model analisis ini telah dijelaskan secara detail dalam kajian literatur. Hasil dari analisis model Fujikake ini selanjutnya digunakan sebagai masukan atau akan dibahas lebih dalam pada metode analisis berikutnya yaitu analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka didapatkan temuan bahwa rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng telah menunjukkan perkembangan kapasitas masyarakat yang cukup baik, hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pemberdayaan menekankan pentingnya suatu proses edukatif atau pembelajaran dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka, sehingga masyarakat memiliki gagasan-gagasan, pemahaman, kosakata, dan keterampilan bekerja menuju perubahan yang efektif dan berkelanjutan.

Penelitian yang ditulis oleh (Juli Panglima Saragih, 2015) ia juga mengatakan bahwa angka kemiskinan penduduk di DIY masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional. Berbagai program kebijakan pengurangan kemiskinan yang telah banyak dilakukan namun ternyata belum mampu mengurangi angka kemiskinan di DIY secara signifikan. Selain itu kebijakan pengentasan kemiskinan di DIY juga belum

didukung anggaran yang memadai, baik anggaran pusat maupun daerah. Tujuan penelitian ini untuk mencari alternatif solusi kebijakan ke depan dalam upaya mempercepat mengentaskan kemiskinan di DIY lebih efektif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif- analisis. Sumber data menggunakan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah pusat dan DIY harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di daerahnya, dengan menciptakan strategi baru seperti, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan usaha bagi kelompok miskin, serta meningkatkan anggaran baik anggaran negara maupun anggaran daerah. Pemerintah DIY juga perlu melindungi si miskin dari ketidakberdayaannya dan mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi lokal dan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita mereka. Koordinasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah yang baik sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan di DIY ke depan.

Program RASKIN terhadap pengentasan kemiskinan, dengan metode deskriptif kuantitatif, berdasarkan hasil dari evaluasi diketahui bahwa pelaksanaan program yang guna mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat mencapai 67,6% dari angka 60% yang diharapkan yang ditulis oleh (Sensia, 2016).

Di dalam penelitian (Sartika et al., 2016) juga mengatakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat miskin di Desa Lohia, Muna Kabupaten. Data yang digunakan adalah data primer dan

sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dari 45 responden. Responden ditentukan secara purposive sampling berdasarkan karakteristik homogen. Data dianalisis dengan deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa orang miskin di Desa Lohia ditandai oleh: usia produktif, jumlah anggota keluarga yang lebih tinggi, jumlah pendidikan dan keterampilan yang lebih rendah, pendapatan yang lebih rendah, kurangnya faktor produksi, dan semakin rendahnya pekerjaan.

Jurnal yang ditulis oleh (F. Setiawan, 2017) mengatakan bahwa Skt-A menjadi penting dalam bukti suatu kepemilikan tanah hutan maupun lahan suatu masyarakat. Kepala adat atau Damang memiliki peran untuk membuat surat tanah dan juga menjadi saksi akan pemindahan hak. (Borneo & Darmadi, 2016) juga mengatakan Dalam penelitian ini berisi tentang kehidupan Dayak di Pulau Kalimantan itu sendiri seperti kepercayaan mereka dan cara hidup mereka untuk bertahan seperti bertani, berladang dengan cara ritual mereka.

Dalam jurnal (Mutiarin & Khadafi, 2017) juga mengatakan bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal kemiskinan Kabupaten Gunung Kidul merupakan daerah termiskin diantara lima Kabupaten/Kota lainnya. Angka kemiskinan, angka buta huruf, angka perceraian, dan angka putus sekolah yang tinggi, semakin memperkuat status Kabupaten Gunung Kidul sebagai Kabupaten termiskin di DIY. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul pasca reformasi

ternyata menunjukkan hasil yang cenderung statis. Sekalipun dalam hal ini, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DIY, maupun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul. Secara umum APBD kabupaten Gunung Kidul masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Angka penduduk miskin masih tinggi, begitu juga dengan buta huruf yang masih menempati urutan kelima diantara Kabupaten lain yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul kedepannya, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul harus segera membenahi diri dengan cara menyediakan data yang lengkap, serta konsisten dengan program pengentasan kemiskinan yang berkesinambungan dan anggaran yang pro terhadap pengentasan kemiskinan. Kreatifitas dan inovasi dalam membuat kebijakan sangat mutlak dibutuhkan, hal ini dikarenakan Kabupaten Gunungkidul terbilang memiliki potensi alam yang luar biasa. Memaksimalkan lahan yang tersedia, mengelola potensi wisata, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah hal yang paling realistis untuk dilakukan saat ini. Mengingat, bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten terluas di DIY dengan potensi alam yang luar biasa, sudah semestinya masalah kemiskinan di Gunungkidul dapat segera diatasi.

Dalam penelitian (Arpan & Ansori, 2018) ia menjelaskan bahwa Kemiskinan terus menjadi masalah yang fenomenal sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menyangkut

ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan, umur, jumlah anggota keluarga terhadap pendapatan penduduk keluarga miskin di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. dengan menggunakan metode analisis Regresi Linier Berganda (Multiplier Regression Model). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari metode wawancara, metode kuisioner, metode observasi (cross section) dengan jumlah sampel sebanyak 70. Hasil regresi yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan umur berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan. Jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan.

Berikut merupakan penjelasan serta judul dari 10 penelitian yang sudah dijelaskan diatas tersebut :

**Tabel 1.2 Literatur Review**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Daulay, 2013)	Dinamika Pemanfaatan Hutan Oleh Suku Anak Dalam Bathin Ix Di Dusun Senami Kabupaten Batanghari	Dalam penelitian ini, tujuannya ialah untuk mengetahui kondisi dari suku Anak Dalam yang tinggal di kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Thaha Senami.



			<p>Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif, Hasil dari penelitian ini ialah warga telah banyak meninggalkan kegiatan eksploitasi hutan tersebut dan beralih menjadi petani kebun karet dan juga sawit. Karna mereka menyadari status Yahura sebagai hutan lindung dan mereka mengikuti aturan yang sudah berlaku, walaupun sebenarnya mereka tak sepenuhnya setuju karena bagi mereka pendapatan jadi tidak maksimal dan merasa terbatas karena adanya hutan yang dilindungi. Ancaman terbesar terhadap Tahura saat ini berasal dari warga pendatang yang terlibat pembalakan liar dan mendirikan pemukiman di kawasan Tahura. Ke depannya warga SAD menginginkan diberi pelatihan life skill serta izin mengolah lahan hutan yang gundul untuk ditanami karet dan sawit.</p>
2.	(Alfana, 2014)	Strategi Rumah Tangga Miskin Perdesaan Keluar Dari Kemiskinan: Kasus Tiga Desa Di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta	Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan strategi masyarakat perdesaan di tiga desa dengan kondisi geografis yang berbeda untuk keluar dari kemiskinan.

			<p>Terpilihnya tiga desa itu karena jumlah penduduk miskinnya secara absolut dan relatif tinggi. Perbedaan itu menarik untuk diteliti karena ada variasi strategi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode survei dan wawancara pada 323 rumah tangga yang tergolong miskin. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada variasi strategi rumah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Rumah tangga miskin di tiga desa menerapkan beberapa strategi. Namun diversifikasi sumber-sumber pendapatan merupakan strategi yang paling banyak dipilih oleh penduduk miskin. Usaha diversifikasi yang dilakukan adalah mengusahakan ternak sapi dan menambah jumlah pohon kakao. Perbedaan pemilihan strategi tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi geografis di setiap desa.</p>
3.	(Juli Panglima Saragih, 2015)	Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Skt-A menjadi penting dalam bukti suatu kepemilikan tanah hutan

			<p>maupun lahan suatu masyarakat. Kepala adat atau Damang memiliki peran untuk membuat surat tanah dan juga menjadi saksi akan pemindahan hak. Angka kemiskinan penduduk di DIY masih relatif tinggi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional. Berbagai program kebijakan pengurangan kemiskinan yang telah banyak dilakukan namun ternyata belum mampu mengurangi angka kemiskinan di DIY secara signifikan. Selain itu kebijakan pengentasan kemiskinan di DIY juga belum didukung anggaran yang memadai, baik anggaran pusat maupun daerah. Tujuan penelitian ini untuk mencari alternatif solusi kebijakan ke depan dalam upaya mempercepat mengentaskan kemiskinan di DIY lebih efektif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif- analisis. Sumber data menggunakan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian</p>
--	--	--	--

			<p>menemukan bahwa pemerintah pusat dan DIY harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di daerahnya, dengan menciptakan strategi baru seperti, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan usaha bagi kelompok miskin, serta meningkatkan anggaran baik anggaran negara maupun anggaran daerah. Pemerintah DIY juga perlu melindungi si miskin dari ketidakberdayaannya dan mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi lokal dan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita mereka. Koordinasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah yang baik sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan di DIY ke depan.</p>
--	--	--	--

4.	(Gunamantha, 2015)	<p>Analisis Dampak Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Buleleng</p>	<p>Pendekatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan PNPM-MPD merupakan pengembangan lebih lanjut dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1998. Salah satu agenda penting di tingkat masyarakat terkait pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan adalah kegiatan pengembangan kapasitas individu masyarakat, pada tataran pelaksanaan di masyarakat kegiatan pengembangan kapasitas tersebut meliputi proses sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan siklus pemberdayaan. Alat analisis yang digunakan dalam mengevaluasi proses pemberdayaan adalah menggunakan model pendekatan evaluasi Fujikake. Model Fujikake merupakan salah satu model evaluasi yang menurut penulis cukup implementatif, dimana indikator-indikator yang digunakan cukup lengkap dan bisa diukur dengan jelas. Penjabaran mengenai model analisis ini telah dijelaskan secara detail dalam</p>
----	--------------------	---	--

			<p>kajian literatur. Hasil dari analisis model Fujikake ini selanjutnya digunakan sebagai masukan atau akan dibahas lebih dalam pada metode analisis berikutnya yaitu analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan maka didapatkan temuan bahwa rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas yang dilaksanakan dalam program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Sawan dan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng telah menunjukkan perkembangan kapasitas masyarakat yang cukup baik, hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pemberdayaan menekankan pentingnya suatu proses edukatif atau pembelajaran dalam melengkapi masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan mereka, sehingga masyarakat memiliki gagasan-gagasan, pemahaman, kosakata, dan keterampilan bekerja</p>
--	--	--	--

			menuju perubahan yang efektif dan berkelanjutan
5.	(Sartika et al., 2016)	Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik masyarakat miskin di Desa Lohia, Muna Kabupaten. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dari 45 responden. Responden ditentukan secara purposive sampling berdasarkan karakteristik homogen. Data dianalisis dengan deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa orang miskin di Desa Lohia ditandai oleh: usia produktif, jumlah anggota keluarga yang lebih tinggi, jumlah pendidikan dan keterampilan yang lebih rendah, pendapatan yang lebih rendah, kurangnya faktor produksi, dan semakin rendahnya pekerjaan etika.
6.	(Sensia, 2016)	Evaluasi Pelaksanaan Program RASKIN Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.	Program RASKIN terhadap pengentasan kemiskinan, dengan metode deskriptif kuantitatif, berdasarkan hasil dari evaluasi diketahui bahwa pelaksanaan program yang guna mengentaskan

			kemiskinan di Kelurahan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat mencapai 67,6% dari angka 60% yang diharapkan.
7.	(Hamid, 2016)	Dayak Asal-Usul Dan Penyebarannya Di Bumi Borneo	Dalam penelitian ini berisi tentang kehidupan Dayak di Pulau Kalimantan itu sendiri seperti kepercayaan mereka dan cara hidup mereka untuk bertahan seperti bertani, berladang dengan cara ritual mereka.
8.	(Setiawan, 2017)	Surat Keterangan Tanah Adat (Skt-A) Oleh Damang Kepala Adat Terkait Pembuatan Sertipikat Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah: Pendekatan Konsep Al- Adah Al-Muhakkamah.	Skt-A menjadi penting dalam bukti suatu kepemilikan tanah hutan maupun lahan suatu masyarakat. Kepala adat atau Damang memiliki peran untuk membuat kan surat tanah dan juga menjadi saksi akan pemindahan hak.
9.	(Mutiarin & Khadafi, 2017)	Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus  Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal kemiskinan Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah termiskin diantara lima Kabupaten/Kota lainnya. Angka kemiskinan, angka buta huruf, angka perceraian, dan angka putus sekolah



			<p>yang tinggi, semakin memperkuat status Kabupaten Gunungkidul sebagai Kabupaten termiskin di DIY. Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul pasca reformasi ternyata menunjukkan hasil yang cenderung statis. Sekalipun dalam hal ini, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DIY, maupun Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Secara umum APBD kabupaten Gunungkidul masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Angka penduduk miskin masih tinggi, begitu juga dengan angka buta huruf yang masih menempati urutan kelima diantara Kabupaten lain yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul kedepannya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus segera membenahi diri dengan cara</p>
--	--	--	--

			<p>menyediakan data yang lengkap, serta konsisten dengan program pengentasan kemiskinan yang berkesinambungan dan anggaran yang pro terhadap pengentasan kemiskinan. Kreatifitas dan inovasi dalam membuat kebijakan sangat mutlak dibutuhkan, hal ini dikarenakan Kabupaten Gunungkidul terbilang memiliki potensi alam yang luar biasa. Memaksimalkan lahan yang tersedia, mengelola potensi wisata, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah hal yang paling realistis untuk dilakukan saat ini. Mengingat, bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten terluas di DIY dengan potensi alam yang luar biasa, sudah semestinya masalah kemiskinan di Gunungkidul dapat segera diatasi.</p>
10	(Arpan & Ansori, 2018)	Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Penduduk Miskin Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud	<p>Kemiskinan terus menjadi masalah yang fenomenal sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan</p>

			<p>kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan, umur, jumlah anggota keluarga terhadap pendapatan penduduk keluarga miskin di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. dengan menggunakan metode analisis Regresi Linier Berganda (Multiplier Regression Model). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari metode wawancara, metode kuisisioner, metode observasi (cross section) dengan jumlah sampel sebanyak 70. Hasil regresi yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan umur berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan. Jumlah anggota keluarga berpengaruh negatif</p>
--	--	--	---

			signifikan terhadap pendapatan.
--	--	--	---------------------------------

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, ada 10 literatur yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul Efektivitas Kelompok Tani Dayak Misik dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Adat Pematang Limau tersebut. Hal yang membandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa ada salah satu jurnal yang ditulis oleh (Mutiarin & Khadafi, 2017) yang berjudul tentang Efektivitas Progam Bantuan Keuangan Khusus dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul. Dalam penelitian, menggunakan variabel keberhasilan pelaksanaan program bantuan keuangan khusus yaitu tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat penggunaanya. Sedangkan dalam penelitian saya akan menggunakan 4 variabel dari teori Budiani yaitu, antara lain: ketepatan sasaran progam, yang berarti apakah progam dari Desa Adat Pematang Limau tersebut sudah sesuai dengan indikator – indikator tersebut, Sosialisai progam artinya, melakukan sosialisasi terhadap progam atau kebijakan yang ingin di kerjakan atau dilakukan, tujuan progam yang berarti apakah target progam atau kebijakan tersebut sesuai dengan rencana dan atau sama dengan hasil pelaksanaan progam atau kebijakan tersebut, dan yang terakhir adalah pemantauan progam artinya kebijakan yang sudah selesai akan tetapi tetap di jaga oleh pembuat atau pihak yang bersangkutan tetap memperhatikan setelah selesainya kebijakan atau progam tersebut telah terlaksana.

## 1.6. Kerangka Teori

### 1. Efektivitas

Efektif berasal dari Bahasa Inggris “*effective*” yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam kamus ilmiah mengartikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, menunjang tujuan atau hasil guna. Soewarno (1994:16) berpendapat bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Pendapat tersebut selaras dengan Hidayat dalam jurnal (H. Setiawan, 2014) yang mengatakan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Dalam jurnalnya (Mutiarin & Khadafi, 2017), Effendy berpendapat bahwa efektivitas merupakan komunikasi dalam proses pencapaian tujuan sesuai dengan biaya yang sudah di anggarkan, waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya serta jumlah personil yang sudah ditentukan. Hadayaningrat (1996) didalam buku yang berjudul Azas – azas Organisasi Manajemen, ia berpendapat bahwa efektivitas merupakan pengukuran yang artinya tercapainya sasaran serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas merupakan hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan juga menurut Mahmudi

(2005) menjelaskan “Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut Sejathi dalam jurnal (Maria Ulfa, 2018), efektivitas adalah “ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.” Di dalam jurnal tersebut Ali Muhidin juga menjelaskan bahwa: “Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client”.

Efektivitas sendiri berfokus terhadap hasil atau outcome, program, atau kegiatan yang dirasa efektif jika yang dihasilkan itu dapat memenuhi tujuan yang sudah ditentukan atau di harapkan.

Efektivitas adalah suatu unsur pokok guna mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan di dalam setiap kegiatan, program maupun organisasi. Disebut efektif jika apa yang telah ditentukan tercapai atau tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. (1994:16) dalam jurnalnya (Darinsyah, 2014).

Georgopolous dan Tannemaum (1985:50), dalam jurnal yang sama juga mengatakan : “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan

saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan”.

Selanjutnya Steers (1985:87) juga menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya yang berjudul Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.

Dalam Jurnalnya (Mutiarin & Khadafi, 2017) juga mengutip dari Cambel (1989:47) yang menyatakan bahwa “Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.”

Dari beberapa pendapat para ahli tentang pengertian efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran akan menyatakan

seberapa jauh target (kualitas, kuantitas serta waktu) yang sudah dicapai oleh kelola atau manajemen yang mana target tersebut sudah ditentukan sebelumnya atau sudah dirancang terlebih dahulu. Maka bisa dikatakan juga bahwa efektivitas adalah ketepatangunaannya suatu program dalam untuk menuju atau mencapai tujuan yang diinginkan.

Budiani (2007:53) yang dikutip didalam jurnal (Mutiarin & Khadafi, 2017) mengatakan untuk mengukur efektivitas suatu program dapat menggunakan variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program,

Artinya, sejauhmana peserta atau objek dari program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi program

Artinya, kemampuan pembuat program atau penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program tersebut, sehingga apa yang ingin dibuat oleh program atau penyelenggara tersebut dapat tersampaikan dengan peserta atau masyarakat pada umumnya.

3. Tujuan program

Yaitu, sejauhmana program yang direncanakan sama dengan hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Pemantauan program



Yaitu, kegiatan pengawasan yang telah dilakukan setelah selesainya program tersebut, sehingga ada bentuk rasa perhatian terhadap peserta program.

Mengukur efektivitas suatu program atau organisasi merupakan suatu yang tidak sederhana, karena efektivitas bisa dikaji dari berbagai sudut pandang dan juga tergantung dari siapa yang mengukur atau menilai serta menginterpretasikannya. Jika dipandang dari pihak produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pengertian bahwa efektivitas adalah kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektifitas juga bisa diukur dengan membandingkan antara rencana yang sebelumnya sudah ditentukan dengan hasil yang sudah diwujudkan. Akan tetapi, apabila usaha atau target yang sudah ditentukan sebelumnya tidak sesuai dengan kenyataannya, maka program atau sesuatu yang capai tersebut tidak efektif.

## **2. Pengentasan Kemiskinan**

Secara Etimologis Kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti serba kekurangan atau tidak berharta benda. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mengartikan kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi segala kebutuhan dasar minimal dalam hidup layak. John Friedman Dalam (Mutiarin & Khadafi, 2017) juga menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan dalam mengakumulasikan kekuatan sosial. Di dalam jurnal tersebut, Frank Ellis juga berpendapat bahwa kemiskinan memiliki banyak dimensi yang

berkaitan dengan politik, sosial-psikologis dan juga aspek ekonomi tentunya. Orang disebut miskin apabila dalam kadar tertentu sumber ekonomi yang dimilikinya tidak memenuhi standar atau di bawah target yang telah ditentukan.

Dalam (KBBI) atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata miskin berarti serba kekuarangan atau tidak harta dalam arti berpenghasilan rendah. Dalam bukunya (Sudarwati, 2009) Lavitan berpendapat bahwa “kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak”.

Secara ekonomi kemiskinan dapat dipahami dengan sumber daya yang kekurangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dari pengertian di atas, maka artinya kemiskinan seseorang berkaitan dengan kebutuhan dan juga pendapatan. Kebutuhan sendiri hanya dikaitkan dengan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar untuk hidup layak. Jika pendapatan seseorang tidak memenuhi kebutuhan minimum dasar, maka ia dapat dikategorikan miskin. Kebutuhan minimum dan tingkat pendapatan merupakan batas garis miskin dan tidaknya seseorang.

Menurut (Suparlan, 1995) “Kemiskinan adalah Suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap

tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.”

Profesor Sajogyo dalam (Sudarwati, 2009) “mengukur kemiskinan melalui kebutuhan beras ekuivalen, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Ia mendefinisikan batas garis kemiskinan sebagai tingkat konsumsi per kapita setahun yang sama dengan beras. Pada awalnya Sajogyo membuat garis kemiskinan adalah setara dengan 240 kg per orang per tahun untuk perkotaan. Namun, selanjutnya ketentuan garis kemiskinan berubah menjadi lebih rinci, yaitu dibawah 240, 240 – 320, 320 – 480, dan lebih dari 480 kg ekuivalen beras. Dengan adanya klasifikasi ini maka dapat dikelompokkan penduduk menjadi sangat miskin, miskin, berkecukupan, dan kecukupan”.

Kemiskinan sendiri merupakan salah satu masalah yang dihadapi umat manusia itu sendiri. Kemiskinan juga merupakan masalah sosial merupakan persoalan klasik yang sudah lama hadir ditengah – tengah kehidupan masyarakat. Kemiskinan juga sudah menjadi permasalahan yang kompleks dan akan terus menjadi suatu persoalan yang aktual dari masa ke masa, dengan itu banyak dari para akedimisi, para praktisi dari berbagai kalangan menarik perhatian mereka akan fenomena kemiskinan tersebut. Berbagai konsep, teori serta pendekatan dari berbagai multidisipliner keilmuaan pun juga terus dikembang. Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, akan tetapi juga bersifat multidimensional karena dalam realitanya juga berkaitan dengan persoalan – persoalan

sosial, budaya, dan juga politik. Maka dari itu masalah kemiskinan bukan hanya tentang kesejahteraan melainkan lebih dari itu.

Pengentasan kemiskinan yang mana tertera dalam dalam pasal Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 34 dimana yang berisi secara tegas “di nyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, hampir 74 tahun sudah konstitusi tersebut digagas, namun dalam realitas yang dihadapi, kemiskinan makin meningkat tajam sedangkan upaya untuk menanggulangnya masih jauh dari harapan dan tidak sebanding dengan lonjakan tingkat kemiskinan yang terjadi.”

Dalam jurnalnya (Juli Panglima Saragih, 2015) yang menutip pernyataan dari Sukirno, tentang lingkaran perangkap kemiskinan adalah suatu rangkaian yang saling mempengaruhi sedemikian rupa sehingga memicu keadaan suatu negara atau wilayah akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ia juga mengatakan bahwa kemiskinan bukan hanya karena ketiadaan pembangunan dimasa lalu akan tetapi timbul juga hambatan terhadap pembangunan di masa mendatang.

(Analisis & Santiko, 2009) dalam tulisannya ia mengutip dari World Bank bahwa kemiskinan merupakan seseorang atau pihak yang kehilangan kesejahteraan (*deprivation of welll being*). Sedangkan permasalahan inti dari kemiskinan tersebut adalah batasan – batasan dari kesejahteraan itu sendiri.

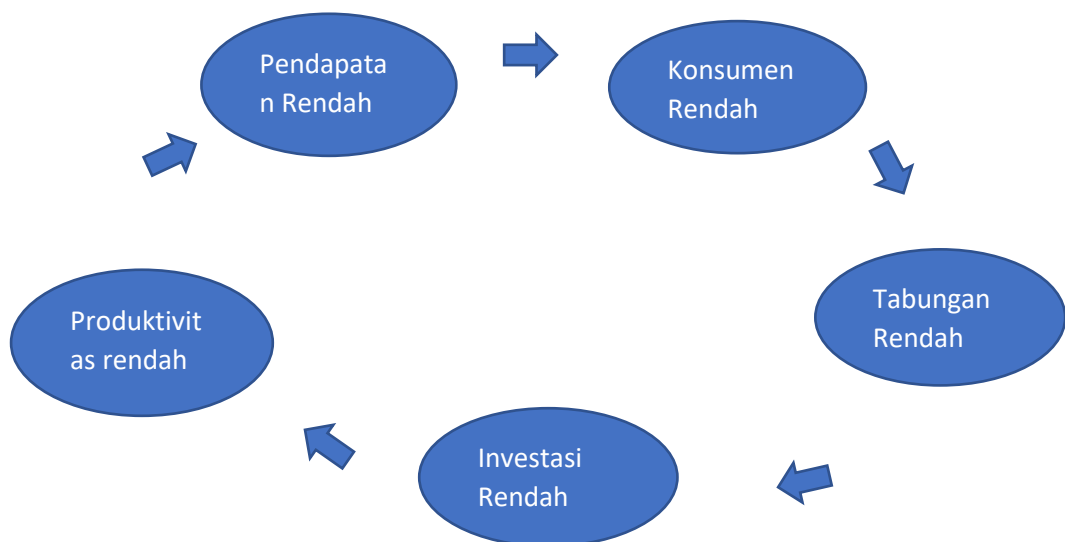
Dalam teori ekonomi, semakin banyak barang yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut semakin banyak pula kesejahteraan yang dirasakannya. Tingkat kesejahteraan sendiri bisa diartikan dengan kemampuan seseorang dalam mengakses atau mendapatkan barang yang dikonsumsi atau tersedia.

Jika kesejahteraan dihubungkan dengan kemiskinan, maka dapat kita simpulkan bahwa ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi atau mendapatkan kesejahteraan atau bisa juga diartikan bahwa seseorang tidak begitu mendapatkan atau memiliki akses terhadap sumber daya guna memenuhi kebutuhannya. Kurang akses yang dimaksud adalah kurangnya pendapatan seseorang.

Lalu Booth dan Me Cawley dalam (Kadji, 2004) juga menyatakan bahwa "di banyak negara memang terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapitanya, tetapi itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakatnya, sedangkan sebagian besar masyarakat miskin kurang memperoleh manfaat apa-apa, bahkan sangat dirugikan". Bank Dunia (1990) dalam laporannya di hadapan anggota PBB bertitel "*Poverty and Human Development*" mengatakan bahwa: "*The case for human development is not only or even primarily an economic one. Less hunger, fewer child death, and better change of primary education are almost universally accepted as important ends in themselves*".

Sedangkan menurut World Bank dalam (Kadji, 2004) juga menjelaskan “penetapan standar kemiskinan berdasarkan dari pendapatan perkapita, penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari”.

**Gambar 1.1**  
**Lingkaran kemiskinan**



**Sumber : World Bank, 2013**

Dari gambar diatas, dapat kita simpulkan bahwa kemiskinan sangat berpengaruh terhadap pendapatan rendah, konsumen rendah, tabungan rendah, produktivitas rendah, dan juga investasi rendah menyebabkan seseorang dikatakan miskin.

Pada umumnya, masyarakat yang tinggal di pedesaan mata pencahariaannya adalah petani dengan kegiatan – kegiatan yang

berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional. Oleh karenanya, penyebab kemiskinan di pedesaan salah satunya ialah sempitnya lahan pertanian yang mereka punya dan juga tidak produktifitasnya lagi lahan pertanian yang mereka miliki. Rendahnya tingkat pendudukan sehingga berakibat pada rendahnya tingkat pengetahuan dan produktivitas dalam mengelola usaha tani, tidak ada pekerjaan sampingan, besarnya jumlah tanggungan, pendapatan yang tidak menentu sebagai akibat usaha yang sangat tergantung dengan musim serta usia tanaman yang mereka miliki sudah cukup tua sehingga kurang prouktif dalam menghasilkan produksi.

Berikut merupakan faktor – faktor yang menyebabkan kemiskinan menurut Sharp yang juga di jelaskan dalam (Kadji, 2004), jika dilihat dari sisi ekonomi ada tiga antara lain :

1. Kemiskinan muncul di akibatkan ketidaksamaan polo kepemilikan sumberdaya yang membuat sitribusi pendapatan menjadi timpang. Penduduk miskin hanya mendapatkan atau memiliki sumberdaya yang rendah dan juga terbatas.
2. Muncul karena adanya perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusianya. Jika kualitas sumberdaya manusia yang renda maka produktifitasnya juga rendah dan sebaliknya. Sumberdaya yang renda kualitasnya ini diakibatkan oleh nasib yang kurang beruntung, keturunan dan deskriminasi dan juga rendahnya pendidikan.
3. Muncul karena adanya perbedaan akses terhadap modal.

Akan tetapi, kemiskinan tidak hanya dipandang dari satu sisi saja. Cara pandang yang berbeda tentang kemiskinan tersebut bisa menjelaskan bagaimana kondisi, konteks, dan juga sifat dalam kemiskinan yang dapat kita pahami, sebagaimana sebab kemiskinan tersebut diidentifikasi, dan bagaimana mengatasi masalah dari kemiskinan tersebut. Menurut Adit dalam (Alfana, 2014) menjelaskan lima bentuk kemiskinan antara lain :

- a. Kemiskinan Kultural, merupakan kemiskinan dimana berkaitan dengan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan karena faktor budaya, maksud dalam artian tidak berusaha untuk mengubah atau memperbaiki tingkat kehidupannya yang bermalasan – malasan, tidak kreatif walaupun ada bantuan dari pihak luar atau juga dari sifat pemborosan.
- b. Kemiskinan Struktural, merupakan situasi yang dikarenakan rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sosial politik maupun budaya yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan tersebut, akan tetapi sering kali menyebabkan subuhnya kemiskinan.
- c. Kemiskinan absolut, merupakan kondisi yang terkait dengan nilai standar kebutuhan minimum yang berada dibawah rata – rata yang tidak mampu memenuhi kehidupan sehari – harinya.
- d. Kemiskinan situasional atau kemiskinan natural, merupakan kemiskinan yang terjadi di daerah – daerah yang memang kurang menguntungkan.



- e. Kemiskinan relatif, merupakan kemiskinan yang disebabkan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyeluruh, sehingga terjadinya ketimpangan dan pendapatan yang kurang merata.

Pada umumnya, masyarakat yang tinggalnya dipedesaan atau di daerah-daerah yang pekerjaannya adalah petani dengan dan yang berhubungan dengan sektor ekonomi tradisional. Oleh karenanya, penyebab dari kemiskinan salah satunya adalah sempit atau kurang tersedianya lahan untuk pertanian yang mereka miliki atau juga tidak produktifitasnya lagi lahan mereka tersebut. Rendahnya tingkat penduduk yang berakibat pada rendahnya tingkat produktivitas dan pengetahuan akan usaha tani itu sendiri, ditambah dengan besarnya tanggungan, tak ada pekerjaan sampingan, serta pendapat yang juga tidak menentu akibat dari usaha yang hanya tergantung dari musim dan juga usia tanaman yang dimiliki juga sudah tua sehingga kurang produktif dalam menghasilkan produksinya. Berikut merupakan penjelasan kemiskinan yang dimaksud atau yang sudah dijelaskan diatas :

- a. Jumlah Tanggungan Keluarga, maksudnya adalah jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, baik yang kandung ataupun bukan saudara kandung. Di negara berkembang contohnya Indonesia, banyak masyarakat yang berpendapat anak merupakan salah satu investasi. Sehingga dengan banyak jumlah keluarga yang di tanggung membuat banyak pula pengeluaran yang harus dikeluarkan. Sehingga tidak seimbangya kebutuhan dan juga pengeluaran. Keadaan tidak

seimbang tersebut di kemukakan oleh (Sartika et al., 2016). Ia juga mengatakan bahwa jumlah tanggungan erat sekali dengan kemiskinan. Menurut (Sartika et al., 2016) “bahwa besarnya jumlah tanggungan keluarga akan berpengaruh terhadap pendapatan di karenakan semakin banyaknya jumlah tanggungan keluarga atau jumlah anggota keluarga yang ikut makan secara tidak langsung akan memaksa tenaga kerja tersebut untuk mencari tambahan pendapatan, sehingga bisa di simpulkan bahwa orang yang memiliki jua tanggungan keluarga yang cukup banyak maka jumlah penghasilan yang di butuhkan juga akan semakin besar, apabila penghasilan yang di butuhkan tidak cukup maka akan terjadi kemiskinan”.

- b. Pendidikan dan Keterampilan yang Rendah, menurut Afrida dalam (Taufiqah Noorva, 2019) menjelaskan bahwa pendidikan adalah syarat guna mengikat martabat manusia. Dengan pendidikan masyarakat mampu membina kemampuannya dan juga mengatur hidupnya secara wajar. Dengan pendidikan yang tinggi juga membuka peluang untuk membuka kesempatan ekonomis guna perbaikan dan juga kemampuan di dalam masyarakat.
- c. Pendapatan Rendah, menurut (Nopirin, 1996) “Pendapatan atau pun penghasilan aialah bentuk balasan karya yang di peroleh sebagai imbalan atau balasan jasa sumbangan seseorang terhadap proses produksi dalam teori fisher”.

d. Kepemilikan sarana produksi yang masih sederhana dan etos kerja, Menurut (Sartika et al., 2016) “yaitu dalam melakukan kegiatan menggunakan alat alat yang masih sederhana dan alakadarnya”.

Dari berbagai banyak defini tentang kemiskinan yang telah dikemukakan oleh para ahli dapat kita simpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau keluarga sedang berada dikondisi serba kekurangan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka berdasarkan kriteria tertentu. Kemiskinan juga tidak hanya dikaitkan dengan masalah materi saja atau permasalahan ekonomi melainkan juga masalah yang kompleks artinya banyak perlu pemahaman yang luas akan pengertian kemiskinan itu sendiri.

Pengentasan Kemiskinan merupakan cara atau langkah yang dilakukan guna memperbaiki atau terlepas dari kekurangan atau dari standar hidup yang sudah ditentukan.

Pengentasan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang di susun di pemerintah pusat, mau pun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin di sertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat,2004). Otonomi daerah memungkinkan peningkatan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Selain itu

peluang tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada di tangan pemerintahan kabupaten dan kota, serta pemerintah desa.

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara penguatan guna memperdayakan dan juga kegiatan pemberdayaan. Masyarakat yang miskin khususnya, misalnya masyarakat yang memang tidak dapat memenuhi kehidupannya sehari – hari. Pada kelompok masyarakat tersebut perlu diberikan program – program pelayanan yang guna meningkatkan kemampuan. Penuntasan kemiskinan guna menuju masyarakat atau keluarga yang sejahtera perlu memasuki variabel non ekonomi. Karena, pengentasan kemiskinan bukan hanya masalah pendapatan, akan tetapi juga dilakukan secara holistik yang berkaitan dengan kehidupan dasar manusia. Orang miskin bukan hanya karena dia tidak mempunyai modal atau juga tidak memiliki aset produksi melainkan juga karena ia tidak mempunyai penyangga ekonomi.

Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan yang di keluarkan dan di implementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang di capai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah terjadi ialah tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi (Rubiyanah, Maria Magdalena Minarsih, 2016) Karena beragamnya sifat tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar

sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung mau pun tidak langsung (Bappenas, 2013).

Menurut (Tontowi, 2010) beberapa strategi telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi tingkat kemiskinan, meskipun kebijakan telah dilakukan tidak secara langsung mengurangi penyebab kemiskinan yang paling mendasar itu sendiri. Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan tujuan untuk sebagai berikut :

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi
- b. Mempermudah lapisan social miskin untuk memperoleh akses dalam berbagai pelayanan social seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, air bersih, sinitasi.
- c. Penyediaan kredit kredit untuk masyarakat lapisan bawah
- d. Pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan
- e. Pengembangan kelembagaan

Dalam jurnal yang ditulis oleh Bagong “Agar program - program pengentasan kemiskinan dapat memberikan hasil yang nyata, tak pelak adalah bagai mana mengempur akar akar kemiskinan hingga tuntas (*attacking the roots of poverty*) (Bagong, 2014)”. Di berbagai daerah, tidak terkecuali Seruyan Hilir, supaya perkembangan jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan dan juga upaya pengentasan kemiskinan bisa di percepat, maka yang di butuhkan adalah kedepannya, memaksimalkan progam yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah, yang berkaitan dengan progam tersebut, baik dari pemerintah yang

bersangkutan menangani program yang sudah di buat ataupun target dari kebijakan tersebut.

### **3. Efektivitas dalam Pengentasan Kemiskinan**

Menurut Cambel yang di kutip oleh (Mutiarin & Khadafi, 2017) “Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dalam pengentasan kemiskinan sendiri perlu Untuk memecahkan masalah, perlu kebijaksanaan yang tepat dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan berikut karakteristiknya lebih dulu. Umumnya, suatu keadaan disebut miskin bila ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah. Agar supaya upaya pengentasan kemiskinan dapat mengenai sasaran dan berhasil dengan baik maka lebih dahulu perlu identifikasi secara jelas faktor-faktor yang diduga,

menyebabkan timbulnya kemiskinan; Ini bukan pekerjaan mudah karena diperlukan suatu sikap yang terbuka dari semua pihak yang merasa bertanggung jawab terhadap kemiskinan. Terutama bagi para pengambil keputusan/kebijaksanaan pembangunan, dibutuhkan adanya semacam self-critics ,atas apa-apa yang telah dilakukan selama ini. Sebab, sebagaimana telah disinggung di muka bahwa kemiskinan dapat terjadi sebagai produk dari peletakan kebijaksanaan pembangunan yang kurang tepat yang memunculkan kesenjangan – kesenjangan.

Maka dalam penelitian ini menggunakan model atau indikator dari Budiani yang di kutip oleh (Mutiarin & Khadafi, 2017) mengatakan untuk mengukur efektivitas suatu program dapat menggunakan variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program, dalam hal ini, sejauhmana peserta atau objek dari program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program artinya, kemampuan pembuat program atau penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program tersebut, sehingga apa yang ingin dibuat oleh program atau penyelenggara tersebut dapat tersampaikan dengan peserta atau masyarakat pada umumnya.
3. Tujuan Program yaitu, sejauh mana program yang direncanakan sama dengan hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Pemantauan Program yaitu, kegiatan pengawasan yang telah dilakukan setelah selesainya program tersebut, sehingga ada bentuk rasa perhatian terhadap peserta program.

Seperti yang dijelaskan di atas, indikator – indikator untuk mengukur efektif atau tidaknya suatu program menggunakan variabel ketepatan sasaran program, yang berarti apakah program dari Kelurahan Seruyan Hilir tersebut sudah sesuai dengan indikator – indikator tersebut, Sosialisai program artinya, melakukan sosialisasi terhadap program atau kebijakan yang ingin di kerjakan atau dilakukan, Tujuan program yang berarti apakah target program atau kebijakan tersebut sesuai dengan rencana dan atau sama dengan hasil pelaksanaan program atau kebijakan tersebut, dan yang terakhir adalah pemantauan program artinya kebijakan yang sudah selesai akan tetapi tetap di jaga oleh pembuat atau pihak yang bersangkutan tetap memperhatikan setelah selesainya kebijakan atau program tersebut telah terlaksana.

## **1.7. Definisi Konseptual**

### **a. Efektivitas**

Dalam hal ini efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi atau sumbangan output terhadap tujuan yang ingin dicapai, maka semakin efektif program atau organisasi tersebut.

### **b. Pengentasan Kemiskinan**

Pengentasan Kemiskinan merupakan di mana suatu keadaan atau seseorang tidak bisa memenuhi standar atau tidak memenuhi target yang



telah ditentukan. Pengentasan kemiskinan merupakan cara atau upaya guna mengurangi kemiskinan yang ada dalam suatu wilayah, artinya mensejahterakan masyarakat Suku Dayak.

**c. Kelompok Tani Dayak Misik**

Kelompok Tani Dayak merupakan suatu organisasi kemasyarakatan yang di bentuk oleh gerakan kelompok tani yang bertujuan untuk membela masyarakat adat Dayak yang bekerja sebagai petani ladang di seluruh pedesaan dan pedalaman atau berbagai profesi lainnya di seluruh desa di Kalimantan Tengah. Program yang bertujuan untuk bersama bergandengan tangan memohon pengakuan dan juga perlindungan dari pemerintah dan juga pemerintah daerah dalam bentuk legalitas tanah atau lahan dan hutan yang ada di desa atau wilayah kedamaian masing – masing.

**1.8. Definisi Operasional**

No.	Tujuan	Variabel	Indikator
1.	Mengetahui Efektivitas Kelomppok Tani Dayak Misik Dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Kuala Pembuang 2 Tahun 2019	Ketepatan Program	- Target dan Sasaran yang menjadi program tersebut.
		Sosialisasi Program	- Mensosialisasikan program Kelompok Tani Dayak Misik kepada masyarakat yang mendapatkan program tersebut.

		Tujuan Progam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuatkan masyarakat atau peserta memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) nya sendiri.</li> <li>- Mengentaskan kemiskinan yang ada diwilayah tersebut dalam progam Kelompok Tani Dayak Misik.</li> </ul>
		Pemantauan Progam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawasan terhadap progam yang dilaksanakan oleh pejabat atau pihak yang terkait.</li> </ul>

### **1.9. Metode Penelitian**

Dalam Metode Penelitian ada empat kata kunci yang harus di perhatikan, antara lain; data, tujuan, cara ilmiah, dan juga kegunaan tertentu. Metode penelitian pada umumnya adalah cara ilmiah guna memperoleh data guna kegunaan dan juga tujuan pada penelitian. Metode Penelitian sendiri biasanya di gunakan merancang suatu pekerjaan yang akan di lakukan sebelumnya, ketika, dan sesudah pengumpulan data.

#### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang menjadi titiknya pengambilan datanya yaitu di Kecamatan Seruyan Hilir.

## **2. Jenis Penelitian**

Menurut (Ghoni, 1997) Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menciptakan penemuan yang tidak dapat atau di peroleh dengan cara prosedur – prosedur statistik atau dengan cara pengakuan atau kuantifikasi.

Penelitian Kualitatif berupaya untuk menghasilkan atau menciptakan teori yang baru dari pada menguji kebenaran akan sebuah teori. (Martono, 2011) menjelaskan bahwa manfaat dari analisis kualitatif yaitu bagaimana individu untuk memaknai atau mengartikan gejala social atau pun objek yang berada di luar maupun di dalam dirinya, sehingga penelitian kualitatif tidak berupaya untuk mencari hubungan antara gejala social yang satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dengan cara mencermati tulisan – tulisan tentang bagaimana efektivitas program gerakan pembebasan petani dayak misik dari kemiskinan dan mental pasrah tersebut, dan juga peneliti memahami percakapan informasi, serta membandingkan dan mencermati hasil wawancara dengan satu informan lainnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah di ajukan oleh peneliti. Terhadap data dan juga bagaimana program ini berjalan, peneliti lebih menggunakan metode wawancara dengan orang yang dianggap dekat dengan objek penelitian ini.

Jadi, dari penjelasan diatas, penelitian dengan metode tersebut dapat menghasilkan suatu data deskriptif bagaimana efektivitas Gerakan Pembebasan Petani Dayak Misik dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Adat Pematang Limau Tahun 2019.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan juga data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Dalam Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat kan dari kegiatan observasi dilokasi penelitian, dan juga melakukan kegiatan wawancara yang lebih mendalam yang berkaitan dengan penelitian langsung.

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pendapat dari informan yang dianggap relevan atau berkaitan dengan penelitian ini.

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua pihak yaitu pihak yang terwawancara atau *interviewee* sebagai pemberi tanggapan dan juga pihak dari interviewer atau pewawancara selaku pemberi pertanyaan (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini untuk dilakukan wawancara atau informan sudah ditetapkan sehingga bisa dijadikan bahan dalam penulisan. Berikut merupakan daftar informan dalam penelitian ini adalahh :

Tabel 1.4 Data Informan

Informan	Jabatan
Pemerintahan Daerah	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pemerintahan Desa	Kepala Desa Pematang Limau
Kepala Adat	Damang Kecamatan Seruyan Hilir
Masyarakat Penerima	Kelompok atau Keluarga yang di kategorikan menerima Progam tersebut.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk menyempurnakan data primer itu sendiri. Data Sekunder dapat diperoleh melalui jurnal, arsip, buku – buku, media massa, maupun peraturan perundang – undangan, serta penelitian yang sudah atau terdahulu yang saling berhubungan dengan progam gerakan pembebasan petani dayak misik dari kemiskinan dan mental pasrah.

Dan untuk data sekunder dalam penelitian ini adalah, antara lain :

- a. Gambaran Umum wilayah Desa Pematang Limau 2019
- b. Data warga miskin Kecamatan Seruyan Hilir
- c. Buku tentang gerakan pembebasan petani dayak misik dari kemiskinan dan mental pasrah

### 1.10. Analisis Data

Menurut (Sugiyono,2016) Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif, Data kualitatif sendiri

di peroleh mella data reduction dan juga display, dan data *conclusion drawing/verification*.

Reduksi data merupakan proses pemusatan perhatian, proses pemilihan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan juga tranformasi data kasar yang muncul saat catatan dari tulisan di lapangan. Proses tersebut berlangsung selama pengerjaan penelitian ini. Analisis data kualitatif ini ialah guna menjawab rumusan masalah mengenai Efektivitas Kelompok Tani Dayak Misik di Desa Adat Pematang Limau Tahun 2019.